

EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN PAAL DUA KECAMATAN PAAL DUA KOTA MANADO

Revly Sian Lizard¹
Marthen Kimbal²
Marlien Lopian³

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya bertujuan mewujudkan kesejahteraan, kedaulatan dan kemandirian, kesejahteraan tercemrin dari peningkatan kualitas hidup lahir batin dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan, kedaulatan terbentuk dari derajat partisipasi yang mampu dilakukan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan, sedangkan kemandirian terwujud dari kemampuan swadaya dan gotong-royong masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sendiri melalui pendayagunaan segenap potensi baik sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan masyarakat, modal finansial, maupun modal sosial yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin di Kelurahan Paal Dua yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah kelurahan bisa dikatakan kurang efektif, hal ini ditunjukkan dari kendala yang dihadapi yaitu pemahaman program kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan belum berhasil dengan baik, karena proses sosialisasi program pemberdayaan seperti kelompok usaha bersama hanya dilakukan satu kali dengan alasan tidak tersedianya anggaran untuk melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tersebut.

Kata Kunci: Efektivitas, Program, Pemberdayaan Masyarakat Miskin.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan keadaan yang timbul dari ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Menurut BAPPENAS (dalam Crescent 2003:4) mendefinisikan “kemiskinan sebagai suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi”. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya kualitas penduduk seperti terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada kenyataan yang masih luasnya tingkat kemiskinan terutama di pedesaan. Kemiskinan juga merupakan sebuah hubungan sebab akibat (kausalitas melingkar) artinya tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi karena rendahnya pendapatan perkapita, pendapatan perkapita yang rendah terjadi karena investasi perkapita yang juga rendah. Tingkat investasi perkapita yang rendah disebabkan oleh permintaan domestik perkapita yang rendah juga dan hal tersebut terjadi karena tingkat kemiskinan yang tinggi dan demikian seterusnya, sehingga membentuk sebuah lingkaran kemiskinan sebagai sebuah hubungan sebab dan akibat (teori Nurkse) dan telah dibuktikan untuk contoh kasus lingkaran kemiskinan di Indonesia (Sumanta, dalam Apriyanti, 2011:1-2). Sebuah studi tentang kemiskinan mengemukakan sebuah kesimpulan menarik mengenai mengapa berbagai program pemerintah tidak mengubah kondisi kemiskinan, yaitu banyaknya penduduk yang membutuhkan bantuan tetapi tidak tersentuh, sebab penentuan kelompok

sasaran program pengentasan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kepentingan aparat pelaksana, sehingga yang paling membutuhkan bantuan sering terpinggirkan. Data tersedia pada umumnya hanya menjelaskan indikasi program-program yang telah dan akan dilaksanakan tidak dapat mengungkapkan efektivitas penggunaan dalam mengatasi kemiskinan di daerah atau dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Serta berapa banyak penduduk miskin yang telah diangkat derajat hidupnya melalui program tersebut. Hal ini menunjukkan secara umum masih banyaknya masalah dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Indonesia, sehingga program tersebut belum dapat dikatakan efektif.

Salah satu konsepsi dan paradigma yang saat ini cukup populer dikembangkan adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya bertujuan mewujudkan kesejahteraan, kedaulatan dan kemandirian. Kesejahteraan tercemin dari peningkatan kualitas hidup lahir batin dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Kedaulatan terbentuk dari derajat partisipasi yang mampu dilakukan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan, sedangkan kemandirian terwujud dari kemampuan swadaya dan gotong-royong masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sendiri melalui pendayagunaan segenap potensi baik sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan masyarakat, modal finansial, maupun modal sosial yang ada. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan salah satu program pembangunan yang berfungsi untuk

meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di tingkat pedesaan dan perkotaan yang diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap hasil. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis, dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, yang ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan lagi obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan (DEPDAGRI, 2008:3). Pelaksanaan PNPM Mandiri di Indonesia dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat. Tahun 2008 diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) serta diprioritaskan pada desa-desa tertinggal, atau disebut juga dengan PNPM Mandiri Pedesaan. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah selama ini sering berduplikasi antar proyek sehingga diharapkan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan program pemberdayaan. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri Pedesaan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Khusus di Kelurahan Paal Dua yang menjadi lokasi penelitian ini, gambaran awal keadaan masyarakat kelurahan sesuai dengan data yang diperoleh di

kantor kelurahan, tercatat sebanyak 54 kepala keluarga dikategorikan kurang mampu dan berhak mendapatkan bantuan melalui program pemberdayaan. Program pemberdayaan yang pernah dilaksanakan selain PNPM perkotaan, pemberian bantuan raskin, juga secara lokal program pemberdayaan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Manado yaitu, program pembangunan berbasis lingkungan (PBL) yang dilaksanakan oleh masyarakat yang ada di lingkungan, bantuan pengobatan gratis bagi warga kota manado dengan menunjukkan identitas kependudukan kota manado, bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu. Program-program pemberdayaan tersebut telah dilaksanakan mengawali periode pertama kepemimpinan walikota G.S. Vicky Lumentut sampai dengan saat ini, periode kedua kepemimpinannya, namun terdapat banyak keluhan yang disampaikan oleh warga penerima, mulai dari pemberian bantuan yang tidak merata, artinya tidak semua warga yang layak dan dikategorikan miskin menerima bantuan tersebut, hal yang kedua adalah keberlanjutan pelaksanaan program pemberdayaan tersebut, dimana untuk tahun 2017 ini program pelayanan kesehatan gratis (universal coverage) tidak lagi dilaksanakan, tetapi mengikuti aturan dari pusat yaitu program kartu Indonesia sehat (KIS).

Uraian tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas program pemberdayaan di Kelurahan Paal Dua belum sebagaimana yang diharapkan, terlebih dalam aspek efektivitas program pemberdayaan tersebut, hal ini diperkuat dengan indikator dari efektivitas itu sendiri yaitu:

1. Pemahaman program, adalah kemampuan dari pelaksana untuk memberikan penjelasan kepada

obyek/masyarakat yang akan diberdayakan, sehingga nantinya akan timbul partisipasi aktif dari obyek/masyarakat yang diberdayakan.

2. Tepat sasaran, adalah ketepatan pemberian bantuan program pemberdayaan kepada mereka yang dianggap sangat layak untuk menerima bantuan berdasarkan pengujian beberapa kriteria kelayakan.
3. Tepat waktu, adalah waktu pelaksanaan pemberian program bantuan sesuai dengan yang telah terjadwal dan terencana, sehingga dapat terukur sudah berapa banyak masyarakat yang telah menerima dan secara langsung mengurangi angka kemiskinan di Kelurahan Paal Dua.
4. Tercapainya tujuan, adalah peningkatan kesejahteraan, perekonomian, motivasi hidup keluarga setelah mendapat program bantuan pemberdayaan.
5. Perubahan nyata, adalah pola perilaku keluarga yang menerima program bantuan, dengan meningkatnya etos kerja dan keterampilan sehingga lebih mandiri dan mampu membiayai keperluan primer kebutuhan rumah tangga.

Kelima indikator pemberdayaan tersebut pada umumnya belum dapat dicapai melalui program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menekan atau meminimalisasi kemiskinan masyarakat yang ada di Kelurahan Paal Dua, sehingga anggapan sementara peneliti bahwa program pemberdayaan di Kelurahan Paal Dua masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif.

Tinjauan Pustaka

Menurut Sondang P. Siagian (2011:32) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Edi (2007:13) menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Selanjutnya Abdurahmat (dalam Edi, 2007:15) menjelaskan efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Menurut kamus administrasi efektif adalah berhasil guna/tepat guna. Efektif adalah pencapaian sasaran mengenai suasana dagang dan kemungkinan membuat laba/keuntungan. Efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Pekerjaan yang efisien adalah hasil yang dicapai dengan penghamburan pikiran, tenaga, waktu, ruang dan benda. Steers (dalam Sutomo, 2010:59) mengatakan bahwa yang terbaik dalam memeliti efektivitas adalah memerhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan, yaitu: optimalisasi tujuan-tujuan, perspektif sistem dan tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi. Cara seperti ini disebut ancangan saja, misalnya hanya dari segi tujuan. Ancangan optimalisasi tujuan-tujuan memungkinkan dikenali bermacam-macam tujuan, meski

tampaknya sering saling bertentangan. Kaitannya dengan optimalisasi tujuan efektivitas itu dinilai menurut seberapa jauh susunan organisasi berhasil mencapai tujuan-tujuan yang layak dicapai yang satu sama lain saling berkaitan. Penilaian terhadap efektivitas berupa pernyataan berdasarkan fakta tentang seberapa banyak tujuan program dapat dicapai, seberapa besar komponen-komponen program telah berfungsi dalam pencapaian tujuan. Berbicara tentang efektivitas program maka persoalannya menjadi tumbuh kompleks apalagi diingat bahwa sumber masalah yang hendak dipecahkan tak hanya berasal dari kondisi individu sebagai penyandang masalah, melainkan juga dapat berasal dari level sistem. Program atau usaha dikatakan efektif apabila suatu usaha mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Pengertian yang memadai mengenai tujuan efektivitas ataupun sasaran merupakan langkah pertama dalam pembahasan efektivitas, dimana hal ini sering kali berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Suharto (dalam Swedianti, 2011:5) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan, dan kelompok terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam proses ini, lembaga berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan. Usulan-usulan masyarakat merupakan dasar bagi program pembangunan lokal, regional, bahkan menjadi titik pijak bagi program nasional. Pemberdayaan

pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali dan kelompoknya, serta mampu mengeksistensikan diri secara jelas dengan mendapat manfaat darinya. Pemberdayaan adalah sebuah "proses menjadi", bukan "proses instan". Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Dalam tahap penyadaran, target sasaran yaitu masyarakat miskin diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada. Di samping itu juga diberikan penyadaran bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya. Pada tahap ini, masyarakat miskin dibuat mengerti bahwa proses pemberdayaan itu harus berasal dari diri mereka sendiri. Diupayakan pula agar komunitas ini mendapat cukup informasi. Melalui informasi aktual dan akurat terjadi proses penyadaran secara alamiah. Proses ini dapat dipercepat dan dirasionalkan hasilnya dengan hadirnya upaya pendampingan. Tahap pengkapasitasan bertujuan untuk memampukan masyarakat miskin sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan. Tahap ini dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan life skill dari masyarakat miskin. Pada tahap ini sekaligus dikenalkan dan dibukakan akses kepada sumberdaya kunci yang berada di luar komunitasnya sebagai

jembatan mewujudkan harapan dan eksistensi dirinya. Selain memampukan masyarakat miskin baik secara individu maupun kelompok, proses memampukan juga menyangkut organisasi dan sistem nilai. Pengkapasitasan organisasi melalui restrukturisasi organisasi pelaksana sedangkan pengkapasitasan sistem nilai terkait dengan "aturan main" yang akan digunakan dalam mengelola peluang. Pada tahap pendayaan, masyarakat miskin diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, diakomodasi aspirasinya serta dituntun untuk melakukan self evaluation terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan. Konsep pemberdayaan masyarakat dapat dikembangkan sebagai mekanisme perencanaan dan pembangunan yang bersifat bottom up yang melibatkan peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan perencanaan dan pembangunan. Dengan demikian, program penanggulangan kemiskinan disusun sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berarti dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan dilakukan penentuan prioritas berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingan sehingga implementasi program akan terlaksana secara efektif dan efisien.

Metode Penelitian

Untuk mengungkap masalah penelitian ini digunakan penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi,

motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Moleong, 2006) dan peneliti menjadi instrument utama didalamnya. Hasilnya akan berupa data yang kemudian akan dibentuk secara deskriptif atau penggambaran.

Fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua yang dianalisis berdasarkan pendapat Sutrisno Eddy (2007:27) untuk mengukur efektivitas suatu kegiatan/aktivitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu:

- 1) Pemahaman program.
- 2) Tepat sasaran.
- 3) Tepat waktu.
- 4) Tercapainya tujuan.

Informan yang diteliti digolongkan kedalam dua golongan yakni:

- (1) Informan kunci yakni orang yang mengetahui dengan jelas kondisi penelitian dan mampu menunjukkan siapa-siapa saja yang dapat memberikan informasi mengenai masalah yang akan diteliti. Biasanya yang bertindak sebagai informan ahli adalah lurah ataupun aparatur kelurahan dan kepala lingkungan yang sangat mengetahui keberadaan masyarakat miskin dan berperan penting dalam kelangsungan hidup masyarakat.
- (2) Informan utama, yakni orang yang mengetahui tentang masalah yang akan diteliti. Informan biasa yang diambil untuk masalah penelitian yakni masyarakat yang telah menerima program pemberdayaan.

Hasil Penelitian

Selama ini, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk

menanggulangi dan menghapus kemiskinan, antara lain merumuskan standar garis kemiskinan dan menyusun peta kantong-kantong kemiskinan. Di luar itu, tak sedikit program telah disusun dan dilaksanakan di lapangan, seperti terus memacu pertumbuhan ekonomi nasional, menyediakan fasilitas kredit bagi masyarakat miskin antara lain melalui pemberian bantuan dana IDT, program Takesra-Kukesra, PDM-DKE, PPK, KURK, KUT, dan lain-lain membangun infrastruktur di pedesaan, pengembangan model pembangunan kawasan terpadu, termasuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas program pembangunan, dan lain-lain. Untuk sebagian, berbagai bantuan dan program yang telah diupayakan pemerintah memang cukup bermanfaat. Namun, harus diakui bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan hingga kini masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Masih banyak penduduk Indonesia baik di desa maupun di kota yang hidup dibelit kemiskinan. Di sisi lain, tak bisa diingkari fakta, bahwa kendati jumlah orang miskin menurun, namun kesenjangan dalam banyak hal justru semakin lebar. pada dasarnya lambatnya perkembangan ekonomi rakyat disebabkan sempitnya peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang mana hal itu merupakan konsekuensi dari kurangnya penguasaan dan pemilikan asset produksi terutama tanah dan modal. Pada umumnya masyarakat miskin tidak memiliki surplus pendapatan untuk bisa ditabung bagi pembentukan modal. Pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pokok. Di samping itu, faktor lain yang menyebabkan berbagai program pengentasan kemiskinan menjadi kurang efektif

tampaknya adalah berkaitan dengan kurangnya dibangun ruang gerak yang memadai bagi masyarakat miskin itu sendiri untuk memberdayakan dirinya. Terjadi, kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan penduduk miskin justru terjebak menjadi program yang melahirkan ketergantungan baru, dan bahkan mematikan potensi swakarsa lokal. Diakui atau tidak selama ini pendekatan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan baik di tingkat nasional, regional maupun lokal umumnya adalah dengan pendekatan ekonomi semata. Ada kesan kuat bahwa di mata pemerintah masalah kemiskinan sepertinya hanya dipahami sebagai sebuah persoalan kekurangan pendapatan. Sangat kelihatan pula diberbagai program yang dilaksanakan pemerintah umumnya hanya berusaha memberikan bantuan dibidang permodalan, memberikan subsidi, dan semacamnya. Memang, untuk jangka pendek pemberian bantuan ekonomi itu bisa bermanfaat. Tetapi, untuk jangka panjang sesungguhnya pemberian bantuan ekonomi itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah kemiskinan secara tuntas. Banyak bukti memperlihatkan bahwa pemberian bantuan ekonomi saja ternyata justru melahirkan problem-problem baru yang tidak kalah ruwetnya. Bahkan, tidak mustahil terjadi diperolehnya bantuan modal pinjaman kredit justru akan merupakan titik awal dari macam-macam masalah lain dan kehancuran usaha masyarakat miskin. Sebabnya salah satunya adalah berpangkal dari kesalahan orang miskin itu sendiri yang kadang hidup boros. Tetapi, disisi lain, kesalahan juga bisa bersumber dari tekanan-tekanan kebutuhan ekonomi yang memang tidak bisa dielakkan masyarakat miskin, sering

menyebabkan mereka terpaksa harus mengalihkan dan memanfaatkan kredit yang diperoleh bukan untuk kegiatan produktif, tetapi untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif. Apa yang sudah terjadi selama ini, mengajarkan pada kita bahwa upaya untuk mengentas masyarakat dari perangkap kemiskinan dan sekaligus untuk membangun keluarga sejahtera yang diperlukan bukan hanyalah bantuan ekonomi atau upaya-upaya yang sifatnya karitas saja. Paket-paket bantuan ekonomi di satu sisi akan rawan bias dan justru memperlebar ketimpangan dan kesenjangan antar kelas, sementara di sisi lain upaya-upaya karitas dengan cara menyantuni secara penuh dan menjadikan keluarga-keluarga miskin sebagai obyek amal justru akan menimbulkan ketergantungan saja di pihak mereka yang disantuni dan akhirnya justru akan cuma menimbulkan ketidakberdayaan keluarga atau masyarakat miskin. Kekurangan pokok dari model-model pengentasan kemiskinan yang banyak dipraktikkan di negara sedang berkembang adalah bahwa mereka menjadi begitu memusatkan perhatian pada peningkatan kuantitas produksi atau hasil, sehingga kebutuhan sistem produksi mendapat tempat yang lebih utama daripada kebutuhan rakyat. Bagi Indonesia, kritik ini tampak sangat relevan. Banyak bukti menunjukkan, paket-paket program pengentasan kemiskinan di Indonesia memang lebih banyak berorientasi pada peningkatan produksi daripada bertujuan untuk mendistribusikan kesejahteraan. Paket bantuan permodalan dan bantuan teknologi seperti program motorisasi perikanan atau masuknya huller di desa-desa, misalnya yang diberikan pemerintah meski dimaksudkan untuk mendongkrak pendapatan masyarakat

miskin. Namun, sangat kelihatan bahwa di balik itu maksud yang sesungguhnya adalah untuk meningkatkan produksi demi kepentingan ekspor dan peraihan devisa. Bahkan, yang lebih tragis sering terjadi tindakan yang dilakukan pemerintah atas nama pembangunan bukan memberikan manfaat yang nyata bagi usaha pengentasan kemiskinan, melainkan justru berdampak menggerogoti kemampuan swadaya lokal. Penetrasi teknologi dan modal ke desa-desa miskin, benar di satu sisi telah berhasil mendongkrak angka-angka produksi dan mengantarkan Indonesia ke tahap swasembada dalam berbagai sektor produksi.

Namun, tak bisa diingkari bahwa kesenjangan di saat yang bersamaan justru makin melebar dan potensi masyarakat banyak yang tersungkur digerus modernisasi. Untuk memerangi kemiskinan secara frontal di semua sektor, karena itu yang diperlukan sebenarnya adalah kebijakan yang lebih mendasar sebuah kebijakan anti-kemiskinan yang benar-benar harus mendahulukan serta berdimensi kerakyatan. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh pembangunan. Menurut Korten berpendapat asumsi dasar dari pembangunan yang berpusat pada rakyat menginginkan alternatif paradigma pembangunan yang tidak berorientasi pada produksi dan kebutuhan dasar semata, akan tetapi akan berorientasi pada potensi manusia. Melalui potensi manusia maka kemampuan pengembangan diri sesuai dengan keinginan dapat diharapkan. Orientasi pembangunan yang berpusat

pada rakyat memiliki tiga dasar pemikiran, yakni. Pertama, memusatkan pemikiran dan tindakan kebijaksanaan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan untuk memecahkan masalah mereka sendiri pada tingkat individual, keluarga dan komunitas. Kedua, mengembangkan struktur organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem swa-organisasi. Ketiga, mengembangkan sistem sistem produksi konsumsi yang diorganisir secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah pemilikan dan pengendalian lokal. Pembangunan-pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran kepada individu bukan sebagai subyek, melainkan sebagai aktor yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan yang berpusat pada rakyat menghargai dan mempertimbangkan prakarsa dan perbedaan lokal. Karena itu ia mendukung sistem-sistem swa-organisasi yang dikembangkan di sekitar satuan-satuan organisasi berskala manusia dan komunitas-komunitas swadaya. Pembangunan yang berdimensi pada kerakyatan, ringkas kata sangat mensyaratkan adanya keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat yang serius. Pemberdayaan sendiri pada hakikatnya merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah hal kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus atau breakdown dari hubungan antara subyek dengan obyek. Proses ini mementingkan pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (power) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya

mengalirnya daya dari subyek ke obyek. Hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula obyek menjadi subyek (yang baru), sehingga relasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi antarsubyek dengan subyek yang lain. Samuel Paul, misalnya, menyatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil pembangunan. Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan. Oleh karena itu, pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan.

Kesimpulan

1. Pemahaman program kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan belum berhasil dengan baik, karena proses sosialisasi program pemberdayaan seperti kelompok usaha bersama hanya dilakukan satu kali dengan alasan tidak tersedianya anggaran untuk melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tersebut.
2. Program pemberdayaan masyarakat miskin belum sepenuhnya tepat sasaran, hal ini masih ditemui adanya masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan program pemberdayaan tersebut yang diakibatkan kurangnya sosialisasi/pemahaman yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan Paal Dua.
3. Ketepatan waktu pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin yang ada di kelurahan paal dua tidak dapat selesai sesuai waktu yang direncanakan, hal ini lebih disebabkan proses pencairan

bantuan yang memerlukan waktu dan mekanisme yang panjang hingga diterima oleh masyarakat miskin.

4. Tujuan program pemberdayaan ini tidak dapat dikatakan tercapai pada angka seratus persen karena disebabkan kekurangan dan kendala dalam pelaksanaannya.

Saran

1. Sebaiknya pemerintah menyediakan anggaran yang lebih dari yang telah diperuntukkan bagi penerima program pemberdayaan masyarakat miskin di kelurahan paal dua, karena bantuan yang diberikan merupakan modal awal dari setiap kelompok masyarakat miskin yang menerima bantuan untuk memulai usaha dan merintis usahanya hingga tumbuh, berkembang, dan maju.
2. Sebaiknya proses penyuluhan keterampilan tidak sekedar formalitas untuk pelaksanaan program setiap tahunnya karena jelas bahwa penerima bantuan pemberdayaan masyarakat miskin membutuhkan penyuluhan keterampilan berusaha sebagai salah satu bekal bagi upaya mereka membangun usahanya
3. Penting rasanya agar dibuat tim pendamping khusus untuk setiap kelompok yang terbentuk di tingkat kelurahan, karena proses pendampingan harus dilakukan secara intens sebelum kelompok tersebut dapat dikategorikan dalam tahap berkembang.
4. Jika ingin melanjutkan pelaksanaan program di tahun-tahun berikutnya perlu serius dalam pengawalannya dalam artian segala hal yang dinilai tidak efektif perlu ditindaklanjuti seperti proses pendampingan,

penyuluhan keterampilan berusaha, serta jumlah bantuan dana yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Gibson, James L. 2005. *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*. Jakarta: Erlangga.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*. Erlangga. Jakarta.
- Irawan & Suparmoko. 2007. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE
- Khairuddin. 2007. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty.
- Lembaga Ketahanan Nasional. 2008. *Pembangunan Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moleong, lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Santoso. 2009. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Siagian, Matias. 2011. *Metode Penelitian Sosial, Pedoman Praktis Penelitian Bidang Ilmu Sosial dan Kesehatan*. Grasindo Monoratama. Medan.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama.
- Sumodingrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sutrisno, Edy. 2007. *Budaya Organisasi*. Kencana. Jakarta.
- Soetomo. 2010. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Tim Crescent. 2005. *Menuju Masyarakat Mandiri*

EKSEKUTIF

ISSN : 2337 - 5736

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan

Volume 2 No. 2 Tahun 2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

(Pengembangan Model Sistem
Keterjaminan Sosial). Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.

Usman, H. 2009. Metodologi Penelitian
Sosial, Edisi Kedua. Jakarta: Bumi
Aksara.